

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014



Kementerian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia

Latar Belakang

Selama tahun 2004 sampai 2009, berbagai persoalan dan bencana lingkungan yang mengarah kepada terjadinya penurunan kualitas lingkungan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya menanggapi permasalahan lingkungan hidup pada kurun waktu tersebut, yang diprioritaskan pada perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Namun demikian, pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tidak sebanding dengan pemanfaatan sumber daya alam yang melampaui batas. Keadaan ini semakin diperparah dengan terjadinya fenomena perubahan iklim.

Permasalahan lingkungan hidup pada tahun 2010-2014, masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah, dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya sudah tercemar sedang hingga cemar berat. Selain itu, kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas negara.



Persoalan lain adalah peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim jika tidak dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Target Indonesia untuk secara sukarela menurunkan emisi GRK sebesar 26% pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindaklanjuti dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2010-2014, diantaranya melalui peningkatan pengelolaan ekosistem gambut, rehabilitasi lahan kritis, serta menahan laju deforestasi.

Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan, rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim, hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut. Antisipasi terhadap bencana iklim, seperti kekeringan, banjir, longsor, dan bencana lainnya, diantaranya melalui sistem peringatan dini bencana. Upaya pemangku terpadu antar para kepentingan diperlukan untuk memastikan berkembangnya pengembangan sistem peringatan dini bencana dan meningkatnya kemampuan untuk mengurangi resiko kejadian bencana yang terkait dengan perubahan iklim.



Pada akhirnya, kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kajian ADB tahun 2009 tentang dampak perubahan iklim, misalnya, memperkirakan bahwa tanpa upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang akan ditanggung negara-negara Asia Tenggara akan berada sekitar 6,7 persen dari PDB per tahun sejak tahun 2020.

Perubahan Paradigma

Governing Council/GMEF UNEP, Februari 2009 menyepakati upaya pembangunan "ekonomi hijau" sebagai upaya tepat dalam menghadapi krisis finansial global dengan semboyan "The Global Green New Deal". Paradigma ekonomi hijau muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa kegiatan ekonomi memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, baik positif maupun negatif, yang disebut eksternalitas. Paradigma ekonomi hijau berupaya untuk sejauh mungkin menginternalisasikan eksternalitas negatif.

UNEP dalam *Paper Green Economy Brief 2009* melaporkan bahwa beberapa negara telah merespon krisis finansial dengan ekonomi hijau melalui investasi pada infrastruktur hijau sekaligus mengurangi emisi karbon. Jerman meningkatkan pendanaan untuk membiayai renovasi bangunan agar menjadi bangunan hijau, mensubsidi pembangunan transportasi kereta api (low carbon emission), pengelolaan air, mengurangi pajak untuk bangunan hijau dan memberikan keringanan pajak keuntungan untuk kendaraan ramah lingkungan.

Cina mengalokasikan paket stimulusnya untuk energi efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan, meningkatkan pendanaan untuk pembangunan transportasi kereta api serta pembangunan jaringan listrik baru. Korea Selatan menginvestasikan anggaran untuk "perencanaan pertumbuhan hijau" melalui program pemulihan daerah aliran sungai, membuat jalan sepeda, meningkatkan kendaraan yang ramah lingkungan, mengganti lampu lampu untuk fasilitas umum menjadi lampu hemat energi dan lain sebagainya.

Indonesia harus segera melakukan upaya untuk mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi, atau dengan kata lain "Mengubah Krisis Menjadi Peluang".

Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014:

"Terwujudnya Kementerian Lingkungan Hidup yang handal dan proaktif, serta berperan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau".

Misi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014:

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
2. Melakukan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
4. Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010-2014:

sesuai Visi dan Misi: "Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (*green economy*) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan".

Sasaran Strategis:

1. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut, serta air tanah
2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan;
3. Membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
4. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi.

Lokus Prioritas:

- 1. **Daerah Allran Sungai (DAS)**, dengan lokus kegiatan utama yaitu Sungai Cilwung dan Bengawan Solo;
- 2. **Perkotaan**, dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan Kota Kecil;
- 3. **Ekosistem Pulau**, dengan lokus kegiatan utama yaitu Teluk Tomini dan pulau-pulau kecil terluar.

Indikator Kinerja Utama:

- 1. Memastikan peningkatan keberdayaan pengelolaan **gambut**, peningkatan hasil **rehabilitasi 500.000 ha per tahun** dan penekanan laju **deforestasi**;
- 2. Memastikan **penurunan beban pencemaran lingkungan** melalui **pengawasan di 680 kegiatan Industri dan Jasa** pada 2010 dan terus berlanjut: **jumlah hotspot kebakaran hutan** sebesar 20% per tahun; dan tingkat **polusi** keseluruhan sebesar 50% pada 2014;
- 3. Memastikan penghentian kerusakan lingkungan di **11 Daerah Allran Sungai** yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya;
- 4. Memastikan berjalannya fungsi **Sistem Peringatan Dini Tsunami** (Tsunami Early Warning System/TEWS) dan **Sistem Peringatan Dini Cuaca** (Meteorology Early Warning Sysem/MEWS) mulai 2010, serta **Sistem Peringatan Dini Iklim** (Climate Early Warning System/CEWS) pada 2013;
- 5. Memastikan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengurangan risiko, mitigasi dan penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi;
- 6. Memastikan dilakukannya langkah-langkah konkrit adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim;
- 7. Mengkaji dan mengusulkan perbaikan peraturan yang menghambat atau berpotensi menghambat investasi sebelum Juni 2010;
- 8. Pengelolaan keuangan Kementerian memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Arah kebijakan akan dicapai dengan strategi:

- 1. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara, dan keanekaragaman hayati;
- 2. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 3. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten;
- 4. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup;
- 6. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan; dan
- 7. Pengembangan sumber-sumber pendanaan lingkungan alternatif.



PROGRAM & KEGIATAN:

- A. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM & LINGKUNGAN HIDUP (Program Teknis):**
 - 1. Pengelolaan Kualitas Air & Kawasan Gambut
 - 2. Peningkatan Konservasi & Pengendalian Kerusakan Hutan & Lahan
 - 3. Pengawasan & Evaluasi Pemanfaatan Ruang
 - 4. Pengendalian Pencemaran Air
 - 5. Pengendalian Pencemaran Udara
 - 6. Pengendalian Pencemaran Udara dari Emisi & Kebisingan Kendaraan Bermotor
 - 7. Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3) & Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak & Gas
 - 8. Pengelolaan B3 & Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri & Jasa
 - 9. Administrasi Pengelolaan B3 & Limbah B3
 - 10. Penanganan Kasus Lingkungan
 - 11. Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 12. Peningkatan Pelaksanaan Kajian Dampak Lingkungan
 - 13. Pengendalian Perencanaan Ruang dan Lingkungan
 - 14. Pengembangan Kelembagaan PLH
 - 15. Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik
 - 16. Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil
 - 17. Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
 - 18. Perlindungan Atmosfir & Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
 - 19. Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati
 - 20. Pemulihan dan Penanganan Media Lingkungan (Lahan, Pesisir dan Penairan) Tercemar Limbah B3
 - 21. Pengembangan Perundang-Undangan & Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup
 - 22. Pengembangan Sistem Penataan & Pengakuan Hukum Lingkungan
 - 23. Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan
 - 24. Peningkatan Edukasi & Komunikasi Lingkungan
 - 25. Peningkatan Partisipasi Masyarakat & Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 26. ...
- B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (Program Generik #1):**
 - 1. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum, Rumah Tangga, Keuangan dan Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup
 - 2. Pengendalian Internal Kementerian Lingkungan Hidup
 - 3. Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup
 - 4. Pengembangan Telaahan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 5. Peningkatan Kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim
- C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (Program Generik #2):**
 - 1. Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Lingkungan Hidup.



- 26. Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 27. Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 28. Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan
- 29. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 30. Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup
- 31. Peningkatan Kebijakan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 32. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional.

- B. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (Program Generik #1):**
 - 1. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum, Rumah Tangga, Keuangan dan Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup
 - 2. Pengendalian Internal Kementerian Lingkungan Hidup
 - 3. Pengembangan Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup
 - 4. Pengembangan Telaahan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 5. Peningkatan Kinerja Dewan Nasional Perubahan Iklim
- C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP (Program Generik #2):**
 - 1. Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Lingkungan Hidup.

Renstra KLH 2010-2014 lebih detail, kunjungi: <http://www.mznlh.go.id>

